

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN
PRINSIP PEMILIHAN UMUM YANG LUBER DAN JURDIL
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

MEGAWATI

NIM. 10200114037

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa", yang disusun oleh Megawati, NIM: 10200114037, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M, bertepatan 14 Rabiul Awal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 18 Desember 2018 M

23 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip: 19621016 199003 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

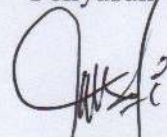
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEGAWATI
Nim : 10200114037
Tempat /tgl. Lahir : Malino, 13 Juni 1996
Jur/Prodi/Konsentarsi : Hukum Pidana dan Ketatanegaran
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa” adalah benar bahwa hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain, (tanpa ada campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 13 November 2018

Penyusun/



MEGAWATI

10200114037

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orangtua yang tercinta, Ayahanda **Saso Sallo** dan Ibunda **Bia Nyampa**, yang senantiasa memberikan penulis beribu curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, masukan, serta doa restunya yang tiada henti mengalir sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan hantaran terima kasih kepada saudara-saudari tercinta beserta keluarga tercinta, terima kasih telah memberikan kasih sayang do'a dan dukungannya, serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas membeerikan banyak bantuan, masukan dan bimbingan sedari awal hingga akhir usainya menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tentunya menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan menurut kemampuan penulis.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu terutama kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
- 2) Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
- 3) Ibu Dr. Nila Sastrawati S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta Dr. Kurniati S.Ag. M.Ag, selaku sekretaris jurusan.
- 4) Abdul Rahman Kanang M.Pd, Ph.D, selaku Pembimbing I dan Dr. Andi Safriani SH.MH, selaku Pembimbing II yang sangat luar biasa dengan sabar memberikan bimbingan, nasehat, saran, dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi.
- 5) Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- 6) Ketua KPU Kabupaten Gowa yang sudah memberikan banyak informasi dan memfasilitasi penelitian dalam pengumpulan data penulis.
- 7) Seluruh teman- teman kuliah Jurusan HPK, angkatan 2014, terkhusus Hastuti, Vhivhy Arida Bhayangkara, May Cening Ayu, Riska Ayu Ningsih, Zulfikar, dan semua teman-teman yang dari awal sampai sekarang banyak memberikan

pengalaman yang sangat luar biasa, semoga Allah swt, memberkahi setiap langkah di dalam hidup kita;

- 8) Seluruh teman-teman organisasi UKM KOPMA, serta Pengurus Kabinet Kreatif Tahun buku 2018 yang sudah memberikan saya banyak bantuan dan dukungan bahkan meluangkan banyak waktu untuk membimbing proses penyusunan skripsi penulis terkhusus kakanda Ahmad Rifai, S.Hum. M.Hum. Ketua KOPMA tahun buku 2018 Mohd. Walid B. Rukman, Ulfa Nurfausiah, Rismadani, Nirwana Ningsih, Emy Utari, NurAzizah, Nadia Napis, Anwar, Hamka. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala hal dan memberikan kita semua kekuatan sehingga bisa membangun KOPMA lebih baik.
- 9) Teman-teman CEO (Creative Entrepreneur Organisation) yang senantiasa selalu memfasilitasi waktu dan pikirannya untuk proses penyelesaian skripsinya, terkhusus Irawati S.Sos, Syarif Hidayatullah, Maulana, Reski Firgiawan, Muh. Arsal Paisal Akbar. Semoga Allah swt memberikan kita kekuatan sehingga jiwa wirausaha kita semakin meningkat.
- 10) Teman-teman PPL Polres GOWA 2017 terkhusus Musram, Nurfadillah yang telah banyak menuntun dan membantu penulis dari awal hingga akhir.
- 11) Teman-teman KKN angkatan 58 Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar, St. Nuramna, Mustika, Citra Annisa Syam, Nurhasdiana, Irmayani, Fahrudin Rijal, Muhammad Fajar, yang banyak mensupport dan selalu disamping penulis.

12) Kepada seluruh keluarga besar khususnya Saso Sallo, Bia Nyampa, Kak Ayyub, Kak Bahoria, Kak Sangkala serta adik-adik yang tercinta Mesya dan Nuraeni yang tidak bosan memberikan banyak dukungan, memberikan semangat, kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah banyak diberikan dengan hati yang tulus kepada penulis selama menyelesaikan studinya hingga rampung. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun hanya melalui doa dan harapan penullis, semoga jasa-jasa beliau yang telah banyak diberi yang tak terhitung.

Makassar, 13 November 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MEGAWATI
M A K A S S A R

12) Kepada seluruh keluarga besar khususnya Saso Sallo, Bia Nyampa, Kak Ayyub, Kak Bahoria, Kak Sangkala serta adik-adik yang tercinta Mesya dan Nuraeni yang tidak bosan memberikan banyak dukungan, memberikan semangat, kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah banyak diberikan dengan hati yang tulus kepada penulis selama menyelesaikan studinya hingga rampung. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun hanya melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah banyak diberi yang tak terhingga.

Makassar, 13 November 2018

Penulis

MEGAWATI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-33
A. Pengertian Pemilihan Umum	13
B. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Umum	22
C. Indikator Pemilu Yang LUBER dan JURDIL	27
BAB III METODE PENELITIAN	34-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35

	D. Metode Pengumpulan Data	35
	E. Instrumen Penelitian	36
	F. Teknik Pengolahan Data	37
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39-63
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
	B. Peran KPU Kabupaten Gowa Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL.....	52
	C. Kesesuain Antara Peran KPU dengan Ketentuan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemilu	53
	D. Pandangan Hukum Islam Mengenai Prinsip yang LUBER dan JURDIL	58
BAB	V PENUTUP	64-65
	A. Kesimpulan	64
	B. Implikasi Penelitian	65
	KEPUSTAKAAN	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------	------	-----------------	------

Huruf			
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ﻯ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*,*khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf kapital

Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Megawati

Nim : 10200114037

Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa

Skripsi ini terdapat 3 (tiga) sub masalah yakni (1) Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Gowa dalam mewujudkan prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil?, (2) Bagaimana kesesuaian antara peran Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilu?, (3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pemilu yang Luber dan Jurdil?.

Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan, dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran kualitatif itu sendiri yakni untuk melihat praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU dalam mewujudkan prinsip Pemilu ada empat tahapan yang umum yakni : (1) tetap berpegang pada real aturan yang telah ada, (2) bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat, (3) mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih, (4) bersikap adil kepada peserta pemilu tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta pemilu dan juga KPU telah berupaya secara maksimal mewujudkan prinsip LUBER dan JURDIL dan sudah sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2014. Serta pandangan Hukum Islam tentang pemilu yang LUBER dan JURDIL diawali contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw dan diberlakukan untuk khalifah sesuai dengan prinsip tersebut maka diambil ayat Al-Quran yang sesuai dengan prinsip tersebut yakni, amanah, jujur, menjaga rahasia, dan adil.

Implikasi penelitian ada tiga yakni: (1) Sesuai dengan peran tersebut diatas maka diharapkan KPU dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta pemilu kedepannya, dengan tetap mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan. (2) upaya atau langkah peneliti dianggap sangat penting bagi KPU yang tetap mempertahankan real aturan yang ada sehingga masyarakat maupun peserta Pemilu tetap merasakan adanya kedudukan yang sama atau punya hak pilih yang sama tanpa ada diskriminasi.

Kata Kunci: Peran Komisi Pemilihan Umum, Prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan berawalnya apa yang disebut era reformasi telah menandai semangat baru dan tekad yang kuat untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis serta reformasi dibidang-bidang lain. Ini berarti demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan lagi menjadi konsep yang perlu dikaji secara ilmiah di lingkungan terbatas, tetapi sudah menjadi bahan yang praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden terpilih B.J Habibi mendapat tugas berat untuk menahkodai Indonesia dimasa transisi. Langkah-langkah yang mengarah kepada proses demokratisasi pun diambil kebebasan pers dijamin, pemberantasan korupsi dilakukan, para pejabat yang diangkat melalui nepotisme diberhentikan, kabinet dirombak, dan yang paling menarik adalah dibukanya keran regulasi politik yang membolehkan didirikannya partai politik.¹ Sehingga demokrasi rakyat dilaksanakan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1999.

Peralihan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden B.J Habibi merupakan pintu gerbang bagi masyarakat Indonesia, karena untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga masyarakat Indonesia bebas memberikan hak suaranya untuk bakal calon yang

¹A.Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. xii.

akan memimpin negara tertuang di dalamnya memiliki hak-hak yakni hak untuk dipilih dan memilih, bahkan hal itu menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Pemilu merupakan, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.² Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945.

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah.

Penyelenggaraan pemilu tentunya ada lembaga yang berperan penting di dalamnya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU juga merupakan suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemilu.

²Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu, pasal 1 ayat (1).

Dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.³ KPU selanjutnya dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa KPU merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu.⁴ Pengawasan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang di mana di jelaskan di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.⁵

KPUD sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi/atau kabupaten/kota.⁶ Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.⁷

KPUD tentunya sudah menerapkan nilai-nilai pemilu dari awal harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku tidak boleh dilanggar atau tetap

³Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bab 7, pasal,22 E.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁵Noor M Aziz, “*Pkj. Pilkada. Tentang pemilihan Kepala Daerah*”, Kementrian Hukum Dan HAM 130 , No. 12 (2009), h. 9.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 21.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 1.

harus berdasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pandangan Huntington, menyebutkan bahwa demokrasi dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan secara kolektif dipilih melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil, untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya.

Tulisan Noor M. Azis, dalam laporannya menjelaskan bahwa menanamkan prinsip-prinsip pemilu, harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip nilai demokrasi berdasarkan pada undang-undang yang ada, sehingga hal ini tentu sangat berperan penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.⁸

Maswadi Rauf, dalam buku Muslim Mufti menguraikan bahwa konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, rule of law, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen, dan pengadilan bebas.⁹

Pandangan Islam yang erat kaitannya dengan prinsip pemilu telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4:58.

⁸Noor M Azis, "Pkj. Pilkada. Tentang pemilihan Kepala Daerah", Kementerian Hukum dan HAM 130, No. 12 (2009), h.9.

⁹Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.101.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁰

Ayat ini erat hubungannya dengan berlaku adil dalam menjalankan amanah, ayat ini bersangkutan dengan apa yang telah diamanahkan untuk KPUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah mewujudkan prinsip pemilu lebih amanah dan adil.

Menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat adalah bagaimana KPUD bisa mengawasi semua prinsip pemilu yang dimaksud, termasuk masyarakat yang berwenang untuk memberikan hak suaranya sepenuhnya tanpa ada diskriminasi. Pengawasan tentunya menjadi suatu keharusan dan hal yang penting untuk proses pilkada bisa terkontrol secara baik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan setiap masyarakat.

Wewenang yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah harus tidak menyalahi aturan yang telah diterapkan sehingga benar-

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 1987), h.87.

benar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun dengan peran KPUD yang benar-benar harus lebih bagus kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Pada penelitian ini maka peneliti mengangkat mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang Jujur, Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa

2. Deskripsi fokus

a. Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang dilakoni oleh seseorang diharapkan dapat memberikan manfaat pada situasi sosial tertentu. Peran menjadi bermakna ketika berkaitan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran merupakan persamaan dengan pengaruh, jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah daya yang muncul dari organisasi sehingga membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut membawa dampak yang sangat besar secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.

b. Komisi pemilihan umum daerah

Komisi Pemilihan umum daerah, secara umum bahwa suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan juga wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan umum

atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Prinsip pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Prinsip Pemilu merupakan suatu prinsip yang dipegang teguh oleh KPUD sebagai suatu pedoman dalam menyelenggarakan pemilu, prinsip langsung, dimana setiap penyelenggaraan pemilu semuanya terlibat secara langsung untuk memberikan hak suaranya. Umum, berarti semua masyarakat yang telah mempunyai hak suara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang berhak memberikan hak suaranya pada saat pemilu berlangsung, bebas artinya bahwa semua yang memberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan Rahasia, artinya rakyat sebagai pemilih berhak memberikan hak suaranya untuk diberikan suaranya tanpa diketahui secara umum, atau oleh siapa pun dan dari pihak mana pun. Jujur, berarti semua elemen-elemen yang ada dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan perundang-undangan, Adil semua peserta pemilu, penyelenggara pemilu berhak mendapat perlakuan yang sama bebas dari kecurangan pihak manapun tidak ada keberpihakan dalam bentuk apapun.

d. Pilkada

Pilkada merupakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum daerah.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Gowa dalam mewujudkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?
2. Bagaimana kesesuaian antara peran Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.?

D. *Kajian Penelitian Terdahulu*

Penelusuran penyusun mengenai judul ini, memang sudah banyak yang telah melakukan penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum baik dari skripsi maupun dari berbagai penelitian lainnya. Namun yang membedakan judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada tempat dan upaya KPUD dalam mewujudkan prinsip pemilu yakni LUBER dan JURDIL. Penulis belum mendapatkan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang langsung, umum, Bebas, dan rahasia, jujur dan adil. Pada Pemilhan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yang memiliki tema mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut.

1. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Buku ini membahas tentang politik-politik yang kaitannya sangat erat dengan persoalan-persoalan demokrasi dan juga pemilu. Pemilu yang dibahas dalam buku tersebut adalah system pemilihan umum dengan kentungan sampai kelemahan yang dipakai

dari masa ke masa atau sejak orde lama sampai reformasi. Hal-hal yang diangkat oleh penulis seperti dengan system pemilu sangat erat kaitannya dengan judul peneliti isi dari buku terebut menjadi bahan refensi . Hanya saja isi dari buku ini tidak semua menjadi bahan referensi peneliti sebab dalam buku ini tidak disinggung mengenai lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu.

2. M. Noor A Azis, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.”. Laporan ini membahas mengenai pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan proses Pilkada yang lebih baik, pengawasan yang sangat diperlukan untuk pilkada yang lebih baik. Apa yang diangkat oleh peneliti sebelumnya menjadi sebuah bahan referensi penyusun untuk penelitiannya, salah satu dari isinya menarik untuk bahan referensi sebab berkaitan dengan dengan proses pelaksanaan dan pengawasan pilkada, yang membedakan adalah subjek atau lembaga pengawasan pemilu dan juga prinsip pada pemilu.
3. Muh. Imam Adli Aqil, Peran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gowa Dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilih Presiden Tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai peran KPUD dalam upayanya agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam memberikan hak suaranya, pada penyelenggaraan pesta rakyat untuk pemimpin negaranya. Menjadi titik acuan bagi peneliti di sini merupakan objek atau tempat yang dipilih peneliti sebelumnya sama dan juga kemiripan dengan subjek peneliti sebelumnya yang diangkat berkaitan dengan judul peneliti yang sekarang, namun yang membedakan adalah mengenai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh KPUD

dalam peningkatan partisipasi pemilih atau masyarakat dan juga yang akan bakal dipilih berbeda subjek dengan yang akan diangkat dengan peneliti yang sekarang.

4. M. Yusuf A.R, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik. Hasil penelitian ini membahas mengenai:1). Peran KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu, 2). Sosialisasi tentang Pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. 3). Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan kode etik KPU. Membahas mengenai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU untuk penyelenggaraan Pemilu, jika peneliti sebelumnya telah menyebutkan fungsi yang diatas maka dalam hal ini peneliti yang sekarang mengangkat mengenai peran KPUD dalam mewujudkan prinsip pemilu yang biasanya terhambat dalam proses pengawasan.
5. Gito Talibo, Marlien T. Lopian, Maxi Egeten, Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di kabupaten Bolaang Monggondow Utara). Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.¹¹ Erat kaitannya dengan apa yang dibahas oleh peneliti yang sekarang sebab salah satu peran penting dalam pemilu untuk terselenggaranya dengan baik tentunya ada peran penting KPUD. Terletak pada tujuan dan maksud dari penelitian sebelumnya adalah upaya yang akan dilakukan KPU dalam terselenggaranya pemilu dengan baik, sedangkan penelitian yang sekarang membahas peran dan upaya KPUD dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemilu agar dapat terselenggara dengan baik tanpa ada celah untuk kecurangan dalam menjalankan prinsip tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mewujudkan prinsip prinsip pemilihan
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemilu.
- c. Untuk Mengetahui pandangan hokum Islam tentang Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.

2. Kegunaan

¹¹Gito Talibo, dkk, “Peran Komisi pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, Vol 994. 2008, h. 1.

- a. Sebagai bahan sumbangsi upaya peran komisi pemilihan umum daerah Kab. Gowa dalam mewujudkan prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- b. Memperluas wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat kesesuain antara upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah tersebut dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemilu.
- c. Memperluas wawasan mengenai pandangan hokum Islam tentang prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilihan umum.

Indonesia telah disebutkan sebelumnya bahwa bentuk negara yang dianut adalah demokrasi pancasila, yang berarti semua sistem demokrasi tidak pernah lepas dari UUD 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar atau konstitusi negaranya. Jika menoreh dari atas maka sudah jelas bahwa demokrasi itu dituangkan dalam bentuk Pemilihan Umum salah satunya.

Pemilu merupakan suatu bentuk aspirasi rakyat yang dituangkan dalam sistem demokrasi, rakyat menuangkan pilihan untuk pemerintahannya melalui hak suara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pemilu, rakyat menyuarakan haknya dengan maksud untuk pemerintahan yang lebih baik di negaranya. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat dalam bentuk prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan Pemilu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum, menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu disebut juga dengan “Political Market” artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.²

2. Sejarah pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme atau juga wadah bagi rakyat untuk menyuarakan suaranya untuk pemerintahan di negaranya, atau juga bisa disebut sebagai kualitas demokrasi.

¹Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, pasal 1 ayat (1).

²A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 147.

Pemilihan Umum (PEMILU) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada era orde reformasi merupakan pemilu pertama pada tahun 1999. Pemilu kala itu adalah partai politik (PARPOL) sebagai peserta pemilu dan diselenggarakan secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk langsung oleh presiden yang beranggotakan dari unsur parpol dari wakil pemerintah. Ada 48 banyaknya partai politik menjadi kontestan Pemilu tahun 1999 kala itu.³

Pada masa reformasi ini pula semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu tahun 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada April 2004. Pada pemilu kedua ini pada era reformasi, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi juga mereka dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia masa bakti 2004-2009.⁴

Sebanyak 24 partai politik menjadi peserta pemilu 2004 dan diikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Pada masa pilpres secara langsung yang pertama di era reformasi ini dilakukan melalui dua putaran, hal ini dilakukan sebab pada putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004 tidak diperoleh satu pasangan peserta Pilpres yang memperoleh lebih dari 50% suara. Putaran kedua Pilpres dilakukan pada tanggal 20 September 2004, pada putaran ini dimenangkanlah

³A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 83.

⁴A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h.84.

pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai formature terpilih presiden dan wakil presiden. Pasangan inilah yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masa era reformasi.⁵

Pemilu yang ketiga di era reformasi dalah Pemilhan Umum tahun 2009, berbeda dengan pemilu sebelumnya, pada pemilu 2009 sejumlah 44 partai politik kala itu menjadi konsestan yang terdiri yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal dari daerah pemilihan Nangroe Aceh Darussalam.⁶Pemilihan presiden dan wakil presiden yang kembali di dilaksanakan ini banyak pentas politik yang diperankan para calon presiden dan wakil pesiden,sebab kala itu pertarungan politik sudah semakin kuat.

Pasangan kala itu ada 2 yang berduel pada pemilu 2009, yakni pasangan Prabowo-Wiranto, mereka adalah sosok jenderal lapangan yang kaya, sedangkan dari bingkai lain ada sosok Hatta Rajasa yang diusung langsung oleh Amin Rais ketua partai PAN yang berkoalisi dengan partai demokrat SBY. Sedangkan Jusuf Kalla wakil presiden sendiri naik sebagai kontestan, sebagai calon Presiden berpasangan dengan Wiranto. Namun, pemilu tersebut dimenangkan oleh SBY- Budionoono. SBY sendiri menjabat sebagi presiden kembali, sehingga memimpin Indonesia selama dua periode.

⁵A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h.84.

⁶A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h.84.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung 2004 telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung pula di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999, dan setahun setelah Pilpres 2004, Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota mulai dilaksanakan di Indonesia di berbagai daerah provinsi masing-masing.⁷

Pada pemilihan pilkada telah dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 atas perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana pasangan calon peserta Pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pelaksanaan Pilkada atau biasa juga dikenal dengan istilah Pemilukada dilakukan oleh KPU tingkat provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Selain, KPU lembaga lain juga ada yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilukada adalah lembaga pengawas dan pemantau Pemilu, Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pemantau pemilu yang anggotanya terdiri dari organisasi sosial kemasyarakatan dan kalangan kampus.⁸

3. Sistem pemilihan umum

Bermacam-macam sistem pemilihan umum, yang ada di berbagai negara pastinya apalagi negara-negara yang demokrasi khususnya di Indonesia misalnya, akan tetapi di dalam ilmu politik ada dua prinsip pokok, yaitu;

⁷A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h. 85.

⁸A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, h.85.

- a. *Single-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik), merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.⁹
- b. *Multi-Member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau perwakilan berimbang. Merupakan peralihan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik.¹⁰

Adapun Sistem Pemilihan Umum di Indonesia sejak pemilu pertama (1) tahun 1955 sampai dengan pemilu yang kesepuluh (10) tahun 2004, Indonesia telah menggunakan lima (5) macam sistem pemilu, yaitu;

1. Pada Pemilu Pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proposional yang tidak murni.
2. Pada Pemilu kedua tahun 1971, Indonesia menggunakan Sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar.
3. Pada Pemilu ketiga tahun 1977 s/d pemilu kedelapan tahun 1997, Indonesia menggunakan Sistem proposional.
4. Pada Pemilu sembilan tahun 1999, Indonesia menggunakan Sistem Proposional berdasarkan Stelsel Daftar.
5. Pada pemilu ke sepuluh tahun 2004, Indonesia menggunakan Sistem Perwakilan proposional.

⁹A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 147.

¹⁰A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h. 148.

6. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Indonesia menggunakan Sistem Distrik berwakil banyak.¹¹

Adapun keuntungan dan Kelemahan Kedua Sistem

Keuntungan Sistem Distrik adalah;

1. Sistem distrik lebih mengarah ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu, hal ini akan mendorong dominan perbedaan-perbedaan dalam partai-partai yang ada dan melakukan kerja sama, selambat-lambatnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accoord*.
2. Fragmental partai dan kecenderungan membentuk adanya partai baru dapat diantisipasi, justru sistem ini bisa mendorong ke arah yang penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
3. Kecilnya sistem ini maka wakil yang telah terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Sistem ini juga lebih memudahkan si wakil akan cenderung lebih memperjuangkan sistem distriknya, kedudukannya terhadap pimpinan partai akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai.
4. Sistem distrik lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
5. Sistem distrik ini lebih sederhana dan murah untuk diselenggarakan.¹²

¹¹A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, h.86.

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 467.

Kelemahan sistem Distrik

1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan parti kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongannya berpecah dalam berbagai distrik.
2. Sistem ini kurang representatif, artinya partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia.
3. Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal sehingga menimbulkan banyak anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis.
4. Kemungkinan si wakil lebih cenderung untuk memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.¹³

Keuntungan Sistem proporsional

1. Sistem Proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
2. Sistem proposional dianggap lebih mudah, sebab lebih demokratis, sebab suara yang diperoleh tidak banyak yang hilang, karena semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang masyarakat kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (sense of justice) masyarakat sedikit banyak terpenuhi.¹⁴

Kelemahan Sistem Proporsional

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 467.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 468.

1. Dalam sistem mendorong partai-partai untuk bekerja sama satu sama lain, sistem ini memanfaatkan persamaan-persamaan yang sudah ada, akan tetapi malah sebaliknya lebih cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini lebih cenderung mengakibatkan menambah banyaknya jumlah partai.
2. Sistem ini juga mempermudah adanya fragmentasi partai, karena jika timbul suatu konflik antar sesama partai maka anggotanya lebih cenderung memisahkan diri dan membangun partai sendiri. Dengan alasan bahwa ada peluang bagi partai baru untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Menyebabkan kurangnya kekompakan dalam tubuh partai.
3. Wakil yang terpilih kemungkinannya renggang ikatannya dengan konstituentnya, sebab wilayahnya yang lebih besar (sebesar provinsi), sehingga sangat sulit dikenal banyak orang. Dalam sistem ini otomatis wakil yang terpilih hanya bisa memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum daripada kepentingan yang khusus serta warganya yang jauh dari wilayahnya tersebut.
4. Banyaknya partai yang bersaing, sangat sulit bagi suatu partai untuk meraih suara kebanyakan 50 % dari 100% suara yang dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.¹⁵

4. Fungsi pemilihan umum.

Adapun fungsi pemilihan umum adalah untuk mewujudkan pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin, dan juga rakyat diberikan kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin secara langsung, bebas, rahasia dan terstruktur. Pemilihan umum juga merupakan tempat terwujudnya semua bentuk aspirasi rakyat.

¹⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 469.

B. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Umum

1. Pengertian peran.

Jika seseorang telah diciptakan untuk menjadi seorang manusiawi, otomatis dalam hal ini sudah terlihat dan tergambar peran seseorang, bahkan dalam Al-qur'an pun mengatakan bahwa seorang manusia diciptakan untuk dijadikan sebagai khalifah, atau pemimpin di muka bumi. Dalam hidup di dunia masing-masing orang telah mempunyai kedudukan, atau fungsinya sebagai hamba. Peran merupakan suatu tingkah dalam bentuk tindakan, atau pola perilaku yang menggambarkan seseorang akan tugas dan fungsinya. Hidup di dunia sudah sejak terlahir kita sudah memiliki peran masing-masing sebagai seorang hamba, sebagai yang di jelaskan tadi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran berarti 'lakon, atau pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharakan dimiliki bagi orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat , atau juga pemeran dalam sebuah tokoh masyarakat'.¹⁶

Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain harus menjalankan lakonannya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut.¹⁷

¹⁶Alex MA, Lab BI Kamus Saku Bahasa Indonesia. Tamer, 2013, h. 363.

¹⁷Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushulddin Filsafat, dan Politik UIN Alauddin, 2015), h.22.

Peran itu bisa juga didiskripsikan sebagai gambaran sosial tentang siapa kita, dan kita siapa, dan pasti akan bermana jika kita telah berbaur dengan orang lain atau dalam masyarakat, jika seseorang juga telah melaksanakan hak dan kewajiban berarti sama halnya dia telah melakukan suatu peran. Apabila dalam suatu lembaga hukum ataupun lembaga sosial seseorang menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab maka secara otomatis juga dikatakan dia menjalankan sebuah peran, yang berarti peran itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelum menjalankan perannya.

Peran biasanya berkombinasi dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada status maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran jika tanpa status. Menurut Abu Ahmad, peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya.¹⁸

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹ Peran juga merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu individu yang telah menempati suatu posisi di dalam suatu lembaga sosial atau status sosial, dikatakan peran apabila di tarik kesimpulan yakni;

¹⁸<http://blogspot.com/> peran dalam umum (Diakses Pada 22 Juni 2016) .

¹⁹<http://blogspot.com/> peran dalam umum (Diakses Pada 22 Juni 2016).

Peran meliputi norma-norma berhubungan dengan suatu posisi atau tempat dalam masyarakat atau tempat dia hidup dalam lingkungannya, peranan dalam hal ini berarti rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kemasyarakatan contohnya ketua RT/RW.

Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat dalam sebuah organisasi. Peran juga merupakan rangkaian yang ditimbulkan secara teratur sebab adanya jabatan didalamnya.

2. Pengertian komisi pemilihan umum daerah.

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan umum, secara umum bahwa suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemilihan umum.

UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.²⁰ Komisi pemilihan umum selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017, bahwa Komisi Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU merupakan suatu lembaga

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945, bab VII B, pasal 22E.

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan tetap dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu.²¹

Pemilu tentunya memiliki tujuan yakni memilih wakil rakyat, wakil, daerah membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan jadi lebih maju untuk kedepannya, sehingga dalam penyelenggaraan pesta rakyat diperlukan suatu lembaga yang sangat berperan penting tentunya untuk terlaksananya sesuai dengan mestinya pesta tersebut, maka lembaga ini dibentuk dengan yang lebih dikenal dengan KPU.

Peranan yang lebih dominan dikenal dengan istilah lakonan yang mesti dilakukan oleh suatu lembaga itu tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pemilu diharapkan mampu menjadi suatu perwujudan penyusunan tata kehidupan untuk tetap mempertahankan jiwa nasionalisme dan mempertahankan cita-cita kemerdekaan dalam penyusunan tata kehidupan kedepannya.

Komisi pemilihan umum tentunya suatu wujudan penyalur untuk rakyat dalam menyuarakan hak pilihnya sebagai warga demokrasi, dibentuknya KPU merupakan sebuah sarana atau upaya agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, dapat membantu terselenggaranya pemilu tanpa ada kendala ataupun keributan saat berlangsung pesta rakyat tersebut.

Berdasarkan undang-undang telah disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 1 ayat (8).

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.²²

Undang-undang menjelaskan bahwa untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, merupakan penyelenggara pemilihan gubernur, untuk Pemilihan Umum kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota, selanjutnya disebut juga bahwa dalam penyelenggaraan pemilu dibentuk beberapa pengawas, panitia pemilihan kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada saat sedang berlangsungnya sebuah pemilu, maka dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang dibentuk langsung oleh PPS.

Peran KPU juga adalah memperlakukan semua calon pemimpin secara adil dan merata, tanpa keberpihakan antara satu dan yang lainnya atau bersifat netral. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang akan terselenggaranya pemilihan umum, dan dalam terselenggaranya pemilihan diharapkan mampu mewujudkan semua prinsip pemilihan umum yang berasas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

²²Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, "Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012", *Makassar* 3, no. 2 (Oktober 2013): h.117.

C. Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Undang-undang dan Hukum Islam

Prinsip dalam asas-asas pemilu tidak lagi asing didengar, tentunya jika kita membahas mengenai Pemilu tentunya tidak lepas dari kata prinsip. Prinsip-prinsip ini tentunya adalah hal yang sangat penting jika tanpa prinsip ini tentunya hal-hal yang ada dalam pemilu bisa saja dilanggar dengan berbagai macam cara, dengan adanya undang-undang yang menjelaskan tentang prinsip ini tentu ada acuan yang menjadi titik ukur dalam mewujudkan prinsip tersebut.

Prinsip tersebut adalah prinsip yang memang tak bisa lepas dari pemilihan umum, sebab menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemilu. Menjadi suatu komponen penting pun jika dijadikan acuan untuk mewujudkan pemilihan bebas daai unsur-unsur pelanggaran yang tidak disiplin. Prinsip Pemilu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Pemilu yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan UU No. 3 tahun 1998 (pemilu DPR 1999), adalah sebagai berikut;
 - a. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawasan dan pemantau pemilu, sudah termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat dalam pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ada kebohongan di dalamnya ataupun sesuatu yang disembunyikan.
 - b. Adil, artinya dalam sema penyelenggaraan, pelaksanaan pemilu partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama bebas dari kecurangan pihak manapun tidak ada keberpihakan dalam bentuk apapun.

- c. Langsung, artinya peserta pemilih (rakyat pemilih), mempunyai hak sepenuhnya untuk terlibat secara langsung memberikan hak suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
 - d. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah mempunyai hak untuk ikut memilih dan bagi usia 21 tahun berhak untuk dipilih dengan tanpa adanya diskriminasi (pengecualian) dari pihak manapun ataupun dari siapa pun.
 - e. Bebas, artinya rakyat yang menjadi pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, tekanan ataupun paksaan dari siapa pun dan kondisi apapun.
 - f. Rahasia, artinya rakyat sebagai pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui untuk siapa suaranya diberikan oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang akan dipilihnya hanya pemilih yang tau siapa dipilihnya pada saat pemilihan berlangsung.²³
2. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut;²⁴
- a. Langsung, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaannya pemerintah maupun partai politik peserta pemilih, pengawas dan pemantau pemilih, serta semua yang terlibat di dalamnya, mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani tanpa diwakili dan tanpa perantara.
 - b. Umum, bahwa semua berhak memilih apabila telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah tercantum dalam undang-undang dan telah berhak dipilih jika

²³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, h.149.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Pasal 2.

sudah dimaksudkan telah dewasa dalam hukum keperdataan, tanpa ada pengecualian sedikit pun.

- c. Bebas, bahwa rakyat yang memilih mempunyai hak penuh memilih sesuai dengan hati nuraninya atau sesuai kehendak sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, maupun pengaruh dari siapa pun ataupun alasan apapun itu.
- d. Rahasia, bahwa pemilih harus dijamin oleh undang-undang yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu bahwa hak suaranya tidak akan diketahui oleh siapa pun kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Jujur, artinya bahwa sikap yang mesti di jaga tidak boleh ada kecurangan di dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, artinya bahwa setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada sekat dari kalangan mana dia berasal atau dari pihak manapun tidak mendapatkan kecurangan.

Berdasarkan kedua undang-undang diatas maka di tarik kesimpulan bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pemilu yang mesti dipegang erat agar penyelenggaraannya berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tentunya peranan KPU sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.

3. Prinsip-prinsip pemilu yang dijelaskan dalam Hukum Islam.

Hukum Islam menjelaskan mengenai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan suatu contoh yang dahulu kala telah diterapkan oleh pemerintahan Islam dimulai dari masa Khulafa Ar-rasyidin, dimana kala itu diadakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang diberi nama *ahl Al-hall wa al-Aqdi*

lembaga ini memiliki kewenangan antara lain; (1) menetapkan siapa saja kandidat khalifah yang memenuhi syarat untuk merebut tahta khalifah dalam pemilu, (2) mengumumkan nama-nama kandidat khalifah tersebut kepada masyarakat sehingga sebelum masuk ke bilik suara setiap pemilih sudah Mengetahui dengan pasti untuk siapa calon yang akan diberikan hak suaranya, (3), menentukan waktu pemilihan kepala Negara. Gambaran yang demikianlah diambil sebagai contoh untuk negara-negara demokrasi dewasa ini.²⁵

Perlunya pembentukan lembaga yang dapat dijadikan pedoman dalam pemilihan yang erat kaitannya dengan prinsip pemilu yakni prinsip umum dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3:159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

²⁵Ahmad Riski Alvian, "Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h.14.

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.²⁶

Maksud dari urusan adalah dalam hal politik, ekonomi Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. dan sosial. Sehingga ayat ini menjadi acuan dalam hal mewujudkan salah satu prinsip yakni prinsip Umum, tanpa ada diskriminasi maupun persamaan bagi masyarakat. Hal ini juga mengandung proses seleksi untuk mereka yang akan dipilih sebagai kandidat atau calon kepala negara harus dimusyawarakan oleh lembaga yang berwenang.

Prinsip yang lain adalah prinsip Persamaan dalam pemilu

Persamaan dalam islam prinsip dasar yang agung dalam kehidupan manusia, karena merupakan salah satu mutiara yang terkandung dalam Al-Qur'an yang bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berpijak kepada hal-hal kebaikan, Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 1987), h. 71.

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Manusia diciptakan untuk saling kenal-mengenal, dan tolong menolong, bukan malah sebaliknya untuk saling menyombongkan diri menurut ras dan diskriminasi, bebas yang pasti sama-sama ciptaan Allah, tidak ada perbedaan dimata hukum.



²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.517.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat praktik yang terjadi di lapangan mengenai hal yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di KPUDKab. Gowa, untuk Mengetahui;

- 1) Upaya komisi pemilihan umum daerah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 2) Kesesuaian antara upaya KPUD tersebut dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemilu.
- 3) Pandangan hukum Islam tentang pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹

Acuan ini merujuk pada undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dengan fakta yang ada

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Cet. VII; Palu: Sinar Grafika, 2016), h.16.

dilapangan. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang acuannya berdasarkan observasi langsung ke masyarakat. Pendekatan ketiga yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab mengenai pandangan hukum Islam tentang pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diproses dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Sedangkan data sekunder, penelitian yaitu Penelitian kepustakaan (*Library Research*), merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan materi dalam pembahasan dan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengumpulkan data pada objek penelitian yaitu Kantor KPUD Kabupaten Gowa. Penelitian ini juga memiliki keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan tidak melalui media perantara. Data primer dari penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara kepada pihak KPU Kab.Gowa, Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum yang dapat membantu peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber. Wawancara dalam metode ini adalah dengan cara mencari narasumber yang bisa dimintai langsung keterangannya agar peneliti bisa mendapatkan data. Adapun yang menjadi objek untuk wawancara adalah kantor KPUD Kab. Gowa .

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.²

4. Studi pustaka

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri data dan informasi yang ada dan menelaahnya dengan tekun dengan cara membaca buku-buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti sesuai dengan jenis penelitian yang akan di pilih oleh peneliti yang merujuk pada metodologi penelitian. Instrumen yang digunakan yakni;

²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan praktek, h.176.

1. Peneliti sendiri, yaitu peran yang dilakoni peneliti untuk mampu menemukan data yang akurat dan terpercaya, dilakukan oleh peneliti sendiri tanpa diwakili oleh orang lain sehingga dapat memberikan semua jawaban yang tepat dan pasti sehingga tidak ada satu hal yang dapat diragukan.
2. Daftar pertanyaan, merupakan pedoman wawancara yang digunakan saat meneliti langsung ke lapangan. Dan dalam melakukan wawancara peneliti bisa melakukannya tempat yang telah ditentukan dalam lokasi penelitian.
3. Beberapa alat media yang berupa tap recorder/ camera/ ataupun Handphone. Hal berfungsi agar semua wawancara yang telah dilakukan bisa menjadi bukti kebenaran sebuah data, media ini bisa digunakan untuk merekam, berupa suara dan gambar (video) dan dokumentasi berupa potret (foto) orang dan lokasi penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data.

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis data.

Data yang telah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

1. Sejarah komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.¹

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.²

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹<http://www.gowakab.go.id> (Diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 15.30 wita).

²Noor M Aziz, “*Pkj. Pilkada. Tentang pemilihan Kepala Daerah*”, Kementerian Hukum Dan HAM 130 ,No. 12 (2009), h. 9.

1945 maka dibentuklah lembaga KPU. Sesuai ketentuan umum undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.³

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Kepres No.16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.⁴

³Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (6).

⁴<http://kpu.go.id> . Diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 16.00 wita.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara

Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, sifat mandiri juga berarti menegaskan KPU ketika menyelenggarakan Pemilu bebas dari pihak manapun.⁵

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU sebanyak 11 orang, namun ketika diundangkan kembali UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu, maka jumlah anggota KPU dikurangi menjadi 7 orang, akan tetapi pengurangan anggota KPU yang dari 11 menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU dalam perencanaan dan pelaksanaan baik dari segi tahap-tahap, jadwal, sampai mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁶

Untuk KPU kabupaten Gowa sendiri pada awal mula berdirinya pada tahun 2004 kala itu masih dalam tahap pemilihan presiden pertama, kala itu diadakan proses

⁵Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushulddin Filsafat, dan Politik UIN Alauddin, 2015), h.38

⁶Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", *Skripsi*, h.39.

seleksi calon anggota KPU sebagai salah satu upaya untuk tingkat kota/kabupaten. Maka dengan itu sesuai dengan bunyi pasal UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka tim seleksi tersebut telah menerima sebanyak 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU dan 270 orang dinyatakan lolos seleksi administratif dan 45 orang dinyatakan lulus tes administratif dan tes tertulis kala itu.⁷

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

⁷<http://kpu.go.id>. (Diakses pada Tanggal 6 November 2014 Pukul 08.00 wita).

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁸

3. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum Kabupaten Gowa.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 10 dan Keputusan Presiden nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja sekretariat Umum KPU pada pasal 2 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilu, KPU Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.
- b. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu.
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

⁸<http://www.kpugowa.go.id> (Diakses Pada tanggal 6 November 2016, pukul 13.00 wita).

- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/kota;
- 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundangundangan;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.⁹

4. Tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada pasal 17 yaitu:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

⁹Farida Fauzia, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010), h. 14.

7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;

¹⁰Praturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008, “*Tentang Susunan Orgaanisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilian Umum, Sekretriati Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota*” (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008), h. 6-7.

- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17,

- a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- b. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

5. Daftar data pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah.
(Gambar terlampir)

6. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
(Gambar ada di lampiran)

B. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Lembaga penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah berupaya untuk mewujudkan prinsip pemilu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Gowa, telah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap mewujudkan prinsip tersebut, berbagai upaya yang telah dilakukan agar kinerja KPU tetap eksis dalam peserta rakyat tersebut.

Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum selalu berpegang kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 pada masa itu UU masih berlaku dan belum diubah, sehingga berpegang kepada UU tersebut, adapun cara-cara untuk mewujudkan prinsip pemilu yakni ada empat tahapan yang paling mendasar yang dilakukan oleh KPU;

1. Tetap berpegang pada real aturan yang telah ada.

Maksudnya sebelum masuk tahap kampanye setiap anggota KPU harus benar-benar memahami peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan pemilu pada saat itu, dengan tujuan pada saat menghadapi masa kampanye sudah menjadi pedoman atau pegangan KPU dalam melaksanakan tugasnya.

2. Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat.

KPU tidak semerta-merta dalam melaksanakan tugasnya atau dalam proses pelaksanaan programnya tersebut tidak ada yang menjadi pemannya atau pun juga membuat pertimbangan sendiri dengan caranya sendiri tentunya ada aturan yang mesti dijadikan acuan agar kinerja bias terwujud dengan baik, dalam hal ini KPU selalu berpegang kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan juga surat

edaran baik dari Keputusan Presiden, MA, maupun peraturan-peraturan yang terbaru lainnya.

3. Mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara.

Peran yang dilakukan KPU merupakan komponen penting, sebab salah satu bentuk agar masyarakat terdaftar adalah dengan cara proses pendataan dan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan banyak pemahaman dalam hal Pemilu, sehingga juga merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pesta rakyat yang diselenggarakan. Mengakomodir dalam artian bahwa KPU berperan meyakinkan masyarakat bahwa asas pemilu tersebut bisa diselenggarakan oleh KPU dengan baik dengan berbagai macam pendekatan ke masyarakat.

4. Bersikap adil kepada peserta pemilu tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.

Di Indonesia setiap pemilu sudah diatur dalam PKPU bahwa masing-masing calon peserta pemilu mengukung setiap partai politik (PARPOL), masing-masing parpol tersebut ada 16 untuk masing-masing provinsi kecuali Provinsi Aceh yang terdiri dari 20 Parpol.

Bagi masing-masing Peserta yang menyertakan parpol harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku tidak ada perbedaan diantara masing-masing peserta pemilu. dari kalangan manapun tetap sama perlakuannya dan diupayakan untuk tetap memantau masing-masing parpol pendukung dari peserta, hal ini berkaitan dengan

prinsip pemilu yang jujur dan adil, KPU berupaya berlaku jujur atau terbuka kepada masing-masing peserta pemilu tanpa ada perbedaan di antara mereka.¹¹

Komponen penting yang diambil adalah agar terjadi tidak ada perbedaan atau kecemburuan di antara para peserta pemilu KPU membantu dengan beberapa fasilitas yang berupa baliho dan spanduk bagi masing-masing peserta pemilu yang dicetak dan dipasang bagi masing-masing peserta.

Pelaksanaan pemilu, untuk KPU Kabupaten Gowa tentunya juga berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum (KEPPU). Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilu harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi KEPPU yang telah berlaku.

Selain itu peran yang sangat menonjol yang dilakukan oleh KPU ketika menjelang pemilu kepala daerah (PILKADA) adalah melakukan langkah-langkah atau pendekatan yang lebih aktif ke masyarakat demi terselenggaranya pemilu yang berlandaskan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

1. Pendidikan politik, berarti peran atau upaya KPU sangat penting bagi masing-masing panitia penyelenggara pemilu, sehingga dimaksudkan sebelum terjun langsung ke lapangan tidak terjadi pelanggaran yang fatal bagi mereka, ada

¹¹Wawancara dengan Mukhtar Muis . Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. 24 Oktober 2018, pukul 14:00 wita.

pembebekalan bagi mereka proses ini juga sebagai tahap untuk menyelenggarakan pemilu sekaligus penyeleksian panitia pelaksana penyelenggaraan pemilu.

Selain memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat dan pendidikan pemilu, KPU juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.¹²

2. Sosialisasi ke masyarakat, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan pemilu dengan lebih baik.¹³ Begitupun dengan KPU Gowa upaya yang dilakukan merupakan salah satu cara agar prinsip pada saat

¹²Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushulddin Filsafat, dan Politik UIN Alauddin, 2015), h.39.

¹³Yusuf, *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik* (Universitas 45 Mataram: Sebuah Karya ilmiah, 2010), h. 2-4.

terlaksananya pemilu dapat berjalan dengan baik, masyarakat bisa menyuarkan hak pilihnya dengan secara langsung, dan bebas.¹⁴

Prinsip yang pastinya harus dipegang teguh merupakan prinsip Jujur dan Adil bagi peserta pemilu, sedangkan bagi masyarakat prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia. Untuk langsung berarti masyarakat memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan, untuk umum, bagi mereka yang merupakan warga Negara WNI memiliki hak untuk memilih dan dipilih, bebas berarti setiap masyarakat bebas memberikan hak suaranya tanpa diwakilkan oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun, dan rahasia berarti siapa pun yang dipilihnya merupakan rahasia tersendiri untuknya tidak diketahui secara umum.¹⁵

Bagi masyarakat KPU melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan prinsip tersebut, pada saat pemilihan berlangsung masyarakat bebas menyuarkan haknya sesuai dengan prinsip tersebut tanpa ada rasa diskriminasi, prinsip langsung dilaksanakan pada saat pemungutan suara berlangsung, umum semua yang terdaftar sebagai pemilih tetap datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa diwakilkan oleh siapa pun, apabila yang bersangkutan berhalangan untuk ke TPS KPU melakukan beberapa upaya, yang pertama mendatangi secara langsung ke rumah masyarakat meninjau kondisi pemilih membawa surat suara,

¹⁴ Wawancara dengan Lukman, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas. 23 Oktober 2018, pukul 10.00 wita.

¹⁵ Wawancara dengan Mukhtar Muis . Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. 24 Oktober 2018, pukul 14:00 wita.

Menjemput pemilih adalah cara yang kedua yang dilakukan oleh KPU, apabila memungkinkan untuk dibawa ke TPS secara langsung maka pihak panitia pelaksana datang menjemput pemilih tersebut. Sehingga pemilih bisa menyampaikan langsung hak suaranya, sedangkan untuk prinsip bebas masyarakat bebas untuk siapa suaranya dia berikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan panitia pelaksana pemilu mengawasi dengan baik pada saat pemilihan berlangsung, rahasia sendiri hak suara setiap pemilih tidak diketahui oleh siapa pun baik dari pihak KPU sendiri maupun dari pihak pemilih lainnya.

Pihak penyelenggara sendiri selalu berupaya untuk mewujudkan prinsip tersebut namun biasanya upaya atau cara yang telah disebutkan yakni mendatangi langsung atau menjemput langsung pemilih tidak terlesasi dengan baik dikarenakan ada beberapa hambatan yang dialami oleh Panitia Penyelenggara Pemilu baik tingkat kecamatan maupun tingkat provinsi yakni jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara TPS dengan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata di setiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Gowa.

C. Kesesuaian Antara Peran KPU Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 pasal 1 bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis”.¹⁶

Pasal 10 menyebutkan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara; b. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat; c. melaksanakan Keputusan DKPP; dan d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Kesesuaian KPU sudah menjelaskan secara rinci bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU. Kesesuaian antara peran KPU dengan UU No. 1 tahun 2014, KPU tidak pernah lepas dari peraturan yang mengikat, meskipun itu setiap ada perubahan dalam peraturan mengenai pemilu bahkan digantikan dengan perundang-undangan yang baru KPU tetap mengikuti pedoman yang dibuat oleh pemerintah, walaupun terkadang fakta yang dilapangan berbeda dengan teori yang telah ditetapkan. Selain itu dalam mengembangkan peran maka pihak KPU juga dibantu oleh Pengawas Pemilihan baik untuk di kecamatan maupun untuk pengawas lapangan. Sedangkan untuk sosialisasi ke masyarakat untuk pemilu KPU dibantu oleh lembaga organisasi masyarakat (ORMAS).

Kesesuaian antara KPU dengan UU tentunya sudah sangat sesuai jika dilihat dari sudut pandang pembahasan sebelumnya, hanya saja yang menjadi hambatan bagi

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati”.

¹⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati”, dalam Undang-Undang Pilkadaa 2016 (Permata Press, 2017), h. 10.

KPU itu sendiri kadang hal-hal yang terjadi dilapangan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan sehingga selain UU No. 1 Tahun 2014 KPU juga berpegang kepada PKPU dimana didalamnya dibahas mengenai pedoman PARPOL yang ada di masing-masing provinsi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 PKPU No. 9 Tahun 2015 bahwa “Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten”.¹⁸

Muhtar Muis S.S selaku ketua Umum KPU Kabupaten Gowa mengatakan bahwa “Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, KPU bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Tentunya juga sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan pilkada tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya yang penting harus berpegang pada peraturan yang telah dibuat.”¹⁹

Selaku penyelenggara pemilu yang dipercaya oleh masyarakat tentunya KPU benar-benar telah berupaya secara maksimal menjalankan amanah yang telah diberikan sehingga dalam peran maupun dari segi kinerjanya ataupun eksistensinya

¹⁸Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 1 Ayat (13).

¹⁹Wawancara dengan Muhtar Muis, Pada 24 Oktober 2018, pukul 14.00 wita.

KPU tetap menjalankan peranannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil

Telah diterapkan pada masa pemerintahan Islam di mana pada zaman Rasulullah saw masih hidup penerapan nilai-nilai kepemimpinan beliau patut diambil contoh, ketika zaman beliau pengambilan keputusan dalam sebuah masalah adalah dengan jalan musyawarah, kemudian pada saat berfokus membangun Negara di Madinah dengan mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin adalah merupakan sebuah upaya yang beliau terapkan, penunjukan masing-masing kepala pemimpin bagi kedua kaum ini juga diadakan musyawarah terlebih dahulu.

Setelah menjelang beliau wafat pun penunjukan Abu Bakar As-shidiq dilakukan dengan berunding dengan sahabat-sahabat dekatnya terdahulu, hal ini tentunya menggambarkan cerminan musyawarah yang dikenal dahulu bisa disebut dengan model demokrasi di zaman sekarang, hanya saja letak perbedaannya jika sebelum penunjukan diadakan musyawarah hanya dilakukan dengan sahabat terlebih dahulu, setelah itu barulah dikumpulkan tentang rencana penunjukan tersebut, model sekarang di laksanakan oleh lembaga yang berdiri independen yakni KPU bukan penunjukkan oleh kepala Negara, tetapi sebuah lembaga yang dibentuk oleh kepala Negara itu sendiri.

Pendaftaran dan pencalonan bukan lagi ditunjuk langsung tetapi diadakan oleh KPU, kemudian KPU membentuk sebuah tim untuk segala bentuk administratifnya, keputusan-keputusan tentang berkas, persyaratan lainnyaa, semua hal yang berkaitan

dengan persiapan pemilu KPU lah yang memiliki peranan. Pada masa khulafa pun pengembangan bentuk demokrasi atau pemilu juga telah diterapkan mengenai pengantian kandidat khalifah selanjutnya.

Kaitan antara hukum Islam dengan Islam sebenarnya telah lama sudah diterapkan hanya saja mekanismenya berbeda, pandangan hukum Islam mengenai asas pemilu itu sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni prinsip yang berlaku adil, amanah, jujur, prinsip menjaga rahasia atau dapat dipercaya, dan juga pemimpin yang mengutamakan persamaan. Seperti juga halnya dahulu Nabi menunjuki Abu Bakar sebutan Ash-shidiq yang berarti Amanah, atau dapat dipercaya, olehnya Nabi memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjadi khalifah pertama bagi umat Islam sepeninggalan beliau.

1. Kaitan pemimpin yang amanah dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab/33:72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.²⁰

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 1987), h. 427.

Maksud dengan ayat ini bahwa seorang pemimpin yang telah dipercaya oleh masyarakat harus menjalankan amanah dengan baik, menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, jika dikaitkan dengan prinsip Pemilu maka hal ini tentunya mengarah kepada KPU, bahwa KPU dipercaya untuk penyelenggaraan pemilu oleh presiden demi suksesnya sebuah pesta rakyat, dan masyarakat tentunya percaya sepenuhnya kepada KPU dalam hal penentu pemimpinnya dengan menjalankan prinsip Luber dan Jurdil.

Sedangkan berlaku Adil jika dalam Islam terkhusus untuk bagi pemimpin, sedangkan dalam asas pemilu tentunya berlaku adil di peruntukkan untuk KPU yang harus berlaku adil kepada peserta pemilu atau calon yang akan dipilih, yang berarti semua peserta pemilih mendapat perlakuan yang sama dengan para peserta pemilu lainnya. Untuk dapat dipercaya atau amanah, erat kaitannya dengan asas pemilu yang berarti jujur.

2. Prinsip yang menjelaskan tentang bersikap jujur.

Pada setiap dilaksanakan pemilu berarti sikap setiap orang memang harus berlaku jujur, baik dari penyelenggaranya itu sendiri maupun peserta pemilu dan juga sebagai pemilih, jika dalam pemilu berarti sikap jujur harus dimiliki oleh pihak penyelenggaranya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip menjaga rahasia atau dapat dipercaya.

Nabi telah mencontohkan kepada ummatnya bahwa Nabi adalah tempat curahan hati para sahabatnya, tauladan beliau adalah menjaga rahasia para sahabatnya sehingga para sahabat ketika ada masalah merka langsung datang ke Nabi untuk

menceritakannya, dan Nabi pun tiak pernah mengumbar atau bahkan menceritakan masalah sahabatnya kepada sahabatnya yang ain, akan tetapi Nabi memberikan solusi dari permasalahan sahabatnya tersebut.

Kaitan dengan penjelasan diatas bahwa menjaga rahasia berarti kaitannya dengan Pemilu adalah bagi para pemilih hak suaranya dijamin oleh UU untuk tidak diketahui oleh siapa pun dan dari pihak manapun, ketika seseorang mengadakan pemilu maka tidak seorang pun yang tau untuk siapa hak suaranya diberikan dan tidak diketahui pula oleh KPU bahwa yang memilih harus memilih sesuai dengan pilihannya, artinya para pemilih bebas memberikan hak suaranya kepada siapa pun peserta pemilih itu atau calon pemimpin nantinya yang pasti sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan dan bebas memberikan hak suaranya.

4. Prinsip mengenai berlaku adil

Sangat jelas disini dijelaskan bahwa penguasa atau pemimpin yang adil dalam menetapkan hukum baik kepada keluarga maupun dengan rakyat yang mereka perintah sangat diwajibkan untuk berlaku adil tanpa ada perbedaan sedikit pun apalagi seorang pemimpin suatu Negara tentunya adil itu adalah sebuah peran penting yang harus dipegang, tanpa ada dekriminasi ras, suku maupun Negara.

Kaitan pada prinsip pemilu dominan kepada KPU yang berarti wajib memberikan rasa keadilan kepada peserta pemilih atau calon bakal pemimpin dan juga setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama tanpa ada sekat perbedaan dari kalangan mana dia berasal maupun pihak apapun tidak boleh mendapatkan kecurangan.

Pemimpin yang adil tentunya akan disenangi, jika seorang pemimpin memiliki jiwa tersebut otomatis akan disenangi oleh rakyatnya, sama halnya jika KPU dapat berlaku dil otomatis rakyat sangat senang dan kinerjanya dinilai sangat memuaskan.

Peran KPU tentunya jika sesuai dengan UU maupun kaitannya dengan hukum Islam diharapkan mampu mempertahankan kinerja dan eksistensinya kedepannya, sebuah pemimpin yang baik untuk negaranya pastinya ditentukan oleh peyelenggaranya sendiri.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian pertama, peran KPU dalam mewujudkan prinsip Pemilu ada empat tahapan yang umum yakni :

1. KPU demi mewujudkan prinsip tersebut maka melakukan beberapa upaya yakni; tetap berpegang pada real aturan yang telah ada. Bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat. Mengakomodir para masyarakat agar terdaftar sebagai daftar pemilih dan mempunyai hak suara. Bersikap adil kepada peserta pemilu tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta Pemilu.
2. KPU telah berupaya secara maksimal mewujudkan prinsip LUBER dan JURDIL dan sudah sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2014 dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
3. Pandangan Hukum Islam tentang pemilu yang LUBER dan JURDIL diawali contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw dan diberlakukan untuk khalifah setelah beliau wafat, sesuai dengan prinsip tersebut maka diambil ayat Al-Quran yang sesuai dengan prinsip tersebut yakni, amanah, jujur, menjaga rahasia, dan adil.

B. Implikasi Penelitian

Peneliti berharap KPU dapat tetap mempertahankan eksistensinya dan tetap memberikan perwujudan yang maksimal untuk peserta pemilu kedepannya, dengan tetap mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan. Upaya atau langkah peneliti dianggap sangat penting bagi KPU yang tetap mempertahankan real aturan yang ada

sehingga masyarakat maupun peserta Pemilu tetap merasakan akan adanya kedudukan yang sama atau punya hak pilih yang sama tanpa ada diskriminasi.

Masyarakat diharapkan harus turut serta dalam meningkatkan partisipasinya pada setiap kali ada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sehingga KPU mempunyai kesadaran bahwa masyarakat turut serta mendukung eksistensi kinerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 1987.
- Akhmad, Nurman. "Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014. (Analisis Yuridis UU.NO.8 Tahun 2012". *Skripsi*. Makassar:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014).
- Alex MA, *Lab BI Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Tamer, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Palu: Sinar Grafika 2009
- Alvian Ahmad Riski, "Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)", *Skripsi* Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Aqil, Muh Imam Adli. "Peran Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ushulddin Filsafat, dan Politik UIN Alauddin, 2015.
- A.R, M. Yusuf . *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik* Ganec Swara 4, no.1 (2010).
- Aziz, Noor M. "Pkj Pilkada.Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah", Kementrian Hukum dan HAM130, no. 12 (2009).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet.V; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Fauzia Farida, *Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Seretariat KPU Kabupaten/Kota* Jakarta: Komisi Pemiilihan Umum, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan prektek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- H.I, Rahman A. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ihsan, Muhammad Fajri dan Muhajirah Hasanuddin, "Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan kepala daerah Tahun 2012", *Makassar* 3, no. 2 (2013).
- Mufti, Muslim. *Teori- teori Politik*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.
- Noor M Aziz "Pkj Pilkada.Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah", Kementrian Hukum dan HAM 130, no. 12 (2009): h.18.
- [http:// Pengertian umum.Blogspot.com](http://Pengertian.umum.blogspot.com).Peran Dalam Pengertian Umum. 22 Juni 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008, “*Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota*” Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2008.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati*.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia . Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011, *Tentang Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

Rusyd Andi Muh. Ibnu. “*Peran Organisasi Masyarakat Dalam Keterpilihan Adnan Purictha Yasin Limpo Pada Pilkada 2015 (Studi Terhadap Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Tni/Polri Indonesia Kec. Somba Opu Kab. Gowa)* Skripsi. Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik. UIN Alauddin, 2017.

Talibo, Gito, dkk, “Peran Komisi pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”. *Kompas* vol. 9 no.94.

Ubaedillah, A Dan Abdul Rozak. *Pacasila, Demokrasi, HAM, dan masyarakat Madaani*. Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Yusuf, *Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pendidikan Politik*, Universitas 45 Mataram: Sebuah Karya ilmiah, 2010.

Wawancara dengan Lukman, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas. 23 Oktober 2018, pukul 10.00 wita

Wawancara dengan Muis Mukhtar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. 24 Oktober 2018, pukul 14:00 wita

Internet.

<http://www.gowakab.go.id> (Diakses pada tanggal 6 November 2014, pukul 15.30 wita).

<http://kpu.go.id> . Diakses pada tanggal 6 November 2016 pukul 16.00 wita

[http:// Pengertian umum.Blogspot.com](http://Pengertian.umum.blogspot.com) 22 Juni 2016.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. : (0411) 880829-880202-8983349

Fax. : (0411) 880829-880202-8983349

SURAT KETERANGAN

Nomor : 488/HM.03.1-Kt/04/7306/Sek-kab/XI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MEGAWATI**
Tempat/ Tanggal lahir : Malino, 13 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 10200114037
Pekerjaan : Mahasiswi

Adalah mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar yang benar telah melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, guna penyelesaian skripsi yang berjudul "**Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 01 November 2018

Pt. Sekretaris,

PALINRUNG, SH
Nip : 19660716 199012 1 001

Tembusan :

1. Peninggal.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Model A.3.3-KWK

KABUPATEN/KOTA : GOWA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1.	BAJENG	14	77	22.309	23.775	46.084	
2.	BAJENG BARAT	7	31	8.823	9.514	18.337	
3.	BAROMBONG	7	49	14.068	14.637	28.705	
4.	BIRINGBULU	11	70	15.231	15.555	30.786	
5.	BONTOLEMPANGANG	8	34	7.038	7.017	14.055	
6.	BONTOMARANNU	9	47	11.628	12.746	24.374	
7.	BONTONOMPO	14	51	14.370	16.137	30.507	
8.	BONTONOMPO SELATAN	9	41	11.418	12.917	24.335	
9.	BUNGAYA	7	29	5.393	6.150	11.543	
10.	MANUJU	7	25	5.322	5.794	11.116	
11.	PALLANGGA	16	142	42.769	44.956	87.725	
12.	PARANGLOE	7	26	6.114	6.591	12.705	
13.	PARIGI	5	24	5.209	5.726	10.935	
14.	PATTALLASSANG	8	40	8.966	9.125	18.091	
15.	SOMBA OPU	14	180	54.991	58.398	113.389	
16.	TINGGIMONCONG	7	34	7.997	8.481	16.478	
17.	TOMBOLOPAO	9	50	10.235	10.354	20.589	
18.	TOMPOBULU	8	50	12.157	12.884	25.041	
TOTAL		167	1.000	264.038	280.757	544.795	

ALA UDDIN
MAKASSAR

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
PERATURAN KPU NOMOR: 05 TAHUN 2008 TANGGAL 2 APRIL 2008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

- Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gowa

